

**HUBUNGAN INFORMASI SILPA APBD DAN  
ARUS KAS DENGAN PENGANGGARAN  
BELANJA MODAL PEMERINTAH  
KABUPATEN DI INDONESIA  
BERDASARKAN KLASSTER PERMENDAGRI  
NOMOR 21 TAHUN 2007**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)  
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis  
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

**MUAMMAR FAUZY  
NIM 12030112150001**

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2014**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Muammar Fauzy  
Nomor Induk Mahasiswa : 12030112150001  
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis / Akuntansi

Judul Usulan Penelitian Skripsi : **HUBUNGAN INFORMASI SILPA  
APBD DAN ARUS KAS DENGAN  
PENGANGGARAN BELANJA MODAL  
PEMERINTAH KABUPATEN DI  
INDONESIA BERDASARKAN  
KLASTER PERMENDAGRI NOMOR  
21 TAHUN 2007**

Dosen Pembimbing : Dr. Haryanto, S.E., M.Si., Akt.

Semarang, 27 Juni 2014

Dosen Pembimbing,

A3

(Dr. Haryanto, S.E., M.Si., Akt.)  
NIP 19741222 20001 2 1001

**PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN**

Nama Penyusun : Muammar Fauzy  
Nomor Induk Mahasiswa : 12030112150001  
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis / Akuntansi

Judul Usulan Penelitian Skripsi : **HUBUNGAN INFORMASI SILPA  
APBD DAN ARUS KAS DENGAN  
PENGANGGARAN BELANJA MODAL  
PEMERINTAH KABUPATEN DI  
INDONESIA BERDASARKAN  
KLASTER PERMENDAGRI NOMOR  
21 TAHUN 2007**

**Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 4 Juli 2014**

Tim Penguji

1. **Dr. H. Haryanto, S.E., M.Si., Akt** (.....)

2. **Dr. H. Raharja, M.Si., Akt** (.....)

3. **Drs. A. Santoso Adiwibowo, M.Si., Akt** (.....)

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Muammar Fauzy, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: Pengaruh Informasi SiLPA APBD dan Arus Kas terhadap Penganggaran Belanja Modal Pemerintah Kabupaten di Indonesia berdasarkan klasifikasi Pemerintah Daerah menurut Permendagri Nomor 21 Tahun 2007, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 27 Juni 2014  
Yang membuat pernyataan



(Muammar Fauzy)

NIM : 12030112150001

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari informasi SiLPA APBD dan arus kas dari aktivitas operasi, investasi, serta pembiayaan terhadap penganggaran belanja modal pemerintah kabupaten di Indonesia dengan menggunakan klasifikasi kemampuan keuangan pemerintah daerah berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2007. Pengukuran kemampuan keuangan pemerintah daerah dilakukan dengan perhitungan jumlah total pendapatan pemerintah dikurangi dengan belanja pegawai.

Penelitian ini merupakan penelitian populasi dengan menggunakan data seluruh pemerintah daerah kabupaten yang terdapat di Indonesia dengan kriteria memiliki Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2011 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) serta memiliki Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBD. Jumlah pemerintah daerah yang memenuhi kualifikasi tersebut dan digunakan dalam penelitian ini adalah 393 pemerintah daerah. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester BPK RI Tahun 2012. Alat statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan menggunakan perangkat SPSS (*Statistical Package for The Social*) versi 21.0.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa informasi SiLPA dan informasi arus kas operasional, investasi, serta pembiayaan berpengaruh pada penganggaran belanja modal pemerintah daerah klaster b. Pada pemerintah daerah klaster a, hanya variabel informasi arus kas pembiayaan yang tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penganggaran belanja modal. Sementara, pada pemerintah daerah klaster c, semua variabel tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penganggaran belanja modal.

**Kata kunci: Informasi SiLPA APBD, Arus Kas Aktivitas Operasi, Arus Kas Aktivitas Investasi, Arus Kas Aktivitas Pembiayaan, Penganggaran Belanja Modal, Klaster Pemerintah Daerah.**

## **ABSTRACT**

*This study aims to examine the effect of Net Realized Income of APBD and cash flow information from operating activity, investing activity, and financing activity on Indonesian local government capital budgeting using classification of financial capacity based on Permendagri Nomor 21 Tahun 2007. Local government's financial capacity is measured by calculate local government's global revenues minus salary and allowances of employee.*

*This study is a population study that using all of local government (regency) in Indonesia with the qualification they have Financial Statement for the year 2011 that have been audited by Supreme Audit Board of The Republic of Indonesia (BPK RI) and also have Net Realized Income (SiLPA) of APBD in their financial statement. Numbers of local government that used on this study are 393 local governments. The data which is used is the secondary data obtained from Semester's Audit Results Summary (IHPS) of BPK RI year 2012. The statistic method that used on this study is multiple regression using sets of SPSS (Statistical Package for The Social) version 21.0.*

*The result of this study shows that the information of Net Realized Income of APBD and cash flow information from operating activity, investing activity, and financing activity have significant effect on capital budgeting for "b" local government cluster. On the "a" local government cluster, only cash flow from financing activity that have no significant effect on capital budgeting. On the "c" local government, there are no variables have effect on capital budgeting partially.*

**Keywords :** *Net Realized Income of APBD, Cash Flow from Operating Activity, Cash Flow from Investing Activity, Cash Flow from Financing Activity, Capital Budgeting, Local Government Cluster.*

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirobbil'alamin*, segala puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah SWT atas selesainya penyusunan skripsi dengan judul “Hubungan Informasi SiLPA APBD dan Arus Kas dengan Penganggaran Belanja Modal Pemerintah Kabupaten di Indonesia Berdasarkan Klaster Permendagri Nomor 21 Tahun 2007” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program sarjana (S1) di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

Pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dan membimbing penyelesaian skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Prof. Drs. Mohammad Nasir, M.Si., Akt., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
2. Bapak Dr. Haryanto, S.E., M.Si., Akt. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan dan banyak masukan kepada penulis.
3. Bapak Prof. Dr. Muchamad Syafruddin, M.Si., Akt. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
4. Bapak Adityawarman, S.E., M.Acc., Akt. selaku dosen wali.
5. Bapak Dr. Raharja, M.Si., Akt. dan Bapak Drs. A. Santoso Adiwibowo, M.Si., Akt. selaku dosen penguji yang telah memberikan banyak masukan, arahan, dan koreksi.

6. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang telah memberikan bimbingan dan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis selama proses perkuliahan.
7. Seluruh karyawan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang telah membantu kelancaran proses belajar di kampus.
8. Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Revbang) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang telah menyediakan data untuk digunakan dalam penelitian ini.
9. Rekan-rekan di Biro Sumber Daya Manusia BPK RI yang telah memberikan penulis kesempatan untuk melaksanakan Tugas Belajar ini.
10. Seluruh keluarga tercinta, isteri, orang tua, kakak, dan adik-adik atas doa-doa, harapan, dan motivasi yang tak pernah putus diberikan kepada penulis.
11. Rekan-rekan “Akundip41” mahasiswa Tugas Belajar di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, baik dari BPK RI maupun dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan, terima kasih atas segala kebersamaan yang telah dilalui bersama.
12. Kawan-kawan kost Jl. Prof. Soedharto 9B (Bang Aspar, Roma, Yugo, Nui, Angga, dan Yudha) atas dukungan, motivasi, dan kebersamaan selama ini.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu kelancaran penulis dalam penyusunan skripsi ini

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan oleh penulis

sebagai masukan yang dapat berguna untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak.

Semarang, 27 Juni 2014

Penulis,

Muammar Fauzy

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Hasbunallah wani 'mal-wakiil, ni 'mal-mawla wani 'man-nashiir”*

“Cukuplah Allah tempat berserah diri bagi kami, sebaik-baik pelindung kami, dan sebaik-baik penolong kami”

“Jika kita selalu memikirkan apa kata orang, hidup kita akan selalu terlihat salah”  
(ucapan Buya Hamka kepada istrinya di suatu senja)

“Berbahagialah dia yang makan dari keringatnya sendiri, bersuka karena usahanya sendiri, dan maju karena pengalamannya sendiri”  
(Pramoedya Ananta Toer dalam Bumi Manusia)

Skripsi sederhana ini kupersembahkan untuk:  
Miranti Kurniasih, istriku yang tercinta dan calon buah hati kami  
Ibu bapakku yang kusayangi  
Semua keluarga yang terus memotivasiku  
Terima kasih untuk segala cinta dan kasih sayang kalian yang tidak sederhana

## DAFTAR ISI

|  |      |
|--|------|
| PERSETUJUAN SKRIPSI .....                      | i    |
| PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN.....                | ii   |
| PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....          | iii  |
| ABSTRAK .....                                  | iv   |
| <i>ABSTRACT</i> .....                          | v    |
| KATA PENGANTAR .....                           | vi   |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....                    | ix   |
| DAFTAR ISI.....                                | x    |
| DAFTAR TABEL.....                              | xiii |
| DAFTAR GAMBAR .....                            | xiv  |
| BAB I PENDAHULUAN .....                        | 1    |
| 1.1. Latar Belakang Masalah .....              | 1    |
| 1.2. Rumusan Masalah.....                      | 5    |
| 1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....       | 6    |
| 1.3.1. Tujuan Penelitian .....                 | 6    |
| 1.3.2. Kegunaan Penelitian.....                | 7    |
| 1.4. Sistematika Penulisan .....               | 7    |
| BAB II TELAAH PUSTAKA.....                     | 9    |
| 2.1. Landasan Teori .....                      | 9    |
| 2.1.1. Teori Sinyal.....                       | 9    |
| 2.1.2. Teori Siklus Hidup Perusahaan.....      | 10   |
| 2.1.3. Klaster Kemampuan Keuangan Daerah ..... | 11   |
| 2.2. Penelitian Terdahulu.....                 | 13   |
| 2.3. Kerangka Pemikiran .....                  | 17   |
| 2.4. Hipotesis .....                           | 19   |

|  |           |
|--|-----------|
| 2.4.1. Pengaruh Informasi SiLPA APBD terhadap penganggaran Belanja Modal .....                       | 20        |
| 2.4.2. Pengaruh Informasi Arus Kas dari Aktivitas Operasi terhadap Penganggaran Belanja Modal.....   | 21        |
| 2.4.3. Pengaruh Informasi Arus Kas dari Aktivitas Investasi terhadap Penganggaran Belanja Modal..... | 24        |
| 2.4.4. Pengaruh Informasi Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan terhadap Penganggaran Belanja Modal..... | 25        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>   | <b>28</b> |
| 3.1. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional .....  | 28        |
| 3.1.1. Belanja Modal .....   | 28        |
| 3.1.2. Informasi SiLPA .....   | 30        |
| 3.1.3. Informasi Arus Kas .....  | 30        |
| 3.2. Populasi .....  | 34        |
| 3.3. Jenis dan Sumber Data .....   | 35        |
| 3.4. Metode Pengumpulan Data .....   | 35        |
| 3.5. Metode Analisis .....   | 36        |
| 3.5.1. Pengelompokkan Pemerintah Daerah .....  | 36        |
| 3.5.2. Statistik Deskriptif .....  | 37        |
| 3.5.3. Uji Kelayakan Model .....   | 37        |
| 3.5.4. Uji Hipotesis .....   | 38        |
| 3.6. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan .....  | 40        |
| <b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>  | <b>41</b> |
| 4.1. Deskripsi Umum Objek Penelitian .....   | 41        |
| 4.2. Analisis Deskriptif.....  | 43        |
| 4.3. Uji Kelayakan Model.....  | 45        |
| 4.4. Pengujian Hipotesis .....   | 46        |
| 4.4.1. Pengujian Parsial Model Klaster A .....   | 46        |
| 4.4.2. Pengujian Parsial Model Klaster B .....   | 48        |

|  |    |
|--|----|
| 4.4.3. Pengujian Parsial Model Klaster C .....   | 51 |
| 4.5. Interpretasi Hasil Pengujian Hipotesis .....  | 53 |
| 4.5.1. Interpretasi Hasil Pengujian Hipotesis terhadap<br>Pemerintah Daerah Klaster A..... | 54 |
| 4.5.2. Interpretasi Hasil Pengujian Hipotesis terhadap<br>Pemerintah Daerah Klaster B..... | 54 |
| 4.5.3. Interpretasi Hasil Pengujian Hipotesis terhadap<br>Pemerintah Daerah Klaster C..... | 55 |
| BAB V PENUTUP .....  | 57 |
| 5.1. Simpulan.....   | 57 |
| 5.2. Keterbatasan .....  | 59 |
| 5.3. Implikasi dan Saran .....   | 59 |
| DAFTAR PUSTAKA .....   | 62 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN.....   | 64 |

## DAFTAR TABEL

|  |    |
|--|----|
| Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....                     | 15 |
| Tabel 4.1 Proses Seleksi Data Populasi .....             | 42 |
| Tabel 4.2 Pembagian Klaster Pemerintah Daerah .....      | 42 |
| Tabel 4.3 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian ..... | 43 |
| Tabel 4.4 Pengujian Kelayakan Model .....                | 45 |
| Tabel 4.6 Pengujian Parsial Model Klaster A .....        | 46 |
| Tabel 4.7 Pengujian Parsial Model Klaster B .....        | 49 |
| Tabel 4.8 Pengujian Parsial Model Klaster C .....        | 51 |
| Tabel 4.9 Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis .....      | 53 |

## DAFTAR GAMBAR

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran ..... | 19 |
|-------------------------------------|----|

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Dalam menjalankan organisasi, manajemen perlu menyusun suatu laporan pertanggungjawaban. Salah satu tujuan dari laporan pertanggungjawaban tersebut adalah untuk mengukur kinerja yang telah dilakukan oleh organisasi dan memprediksi kelanjutan kinerja organisasi di masa yang akan datang. Laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban yang disusun oleh manajemen organisasi dapat memberikan informasi kepada para pemilik kepentingan mengenai kinerja keuangan yang telah dilakukan dan prediksi keuangan organisasi di masa yang akan datang. Laporan keuangan juga dapat memberikan manfaat oleh investor dan kreditur dalam menilai kinerja keseluruhan organisasi (Saraswati, 2007).

Komponen yang paling sering menjadi fokus utama dalam menilai kinerja melalui laporan keuangan adalah laba (*earnings*) dan arus kas (Daniati, 2006; Susanto, 2006; Saraswati, 2007). Hal tersebut disebabkan oleh laba dan arus kas diyakini sebagai komponen yang mampu menggambarkan secara menyeluruh kondisi ekonomi serta prospek perusahaan untuk bertumbuh di masa depan (Susanto, 2006).

Selain pertimbangan laba dan arus kas, para pemilik kepentingan harus melihat ukuran perusahaan yang dihubungkan dengan siklus hidup perusahaan

dalam mengevaluasi laba dan arus kas. Black (1998) dalam penelitiannya menemukan bahwa laba dan arus kas perusahaan memiliki karakteristik yang berbeda dalam setiap siklus hidup perusahaan. Hal tersebut menyebabkan ukuran kinerja yang berbeda-beda dalam setiap tahapan siklus hidup perusahaan.

Selain itu, Myers (dikutip dari Saraswati, 2007) mengungkapkan bahwa dalam penilaian kemampuan suatu perusahaan terdapat dua komponen yang dapat dipertimbangkan, yaitu jumlah aset yang dimiliki (*assets in place*) dan kesempatan bertumbuh (*growth opportunities*). Black (1998) menyatakan bahwa pada tahap awal perusahaan (*start-up*) komponen kesempatan bertumbuh lebih besar dimiliki oleh perusahaan, sementara pada tahap akhir siklus hidup perusahaan, komponen yang paling besar justru jumlah aset yang dimiliki perusahaan. Oleh karena itu, informasi ukuran kinerja akuntansi seperti laba dan arus kas juga akan berbeda.

Sejalan dengan hal tersebut, Haryanto (2013) melakukan penelitian yang berhubungan dengan ukuran kinerja akuntansi perusahaan dan siklus hidup perusahaan terhadap pemerintah daerah. Dalam penelitian tersebut, penerapan siklus hidup perusahaan ke dalam ukuran pemerintah daerah dilakukan berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2007 yang membagi klaster pemerintah daerah sesuai dengan kemampuan daerah. Sementara ukuran kinerja yang diterapkan dalam akuntansi pemerintah daerah adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA APBD) dan arus kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pembiayaan. Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa SiLPA APBD

merupakan parameter utama yang menjadi perhatian dari para pemilik kepentingan dalam mengukur kinerja organisasi pemerintah.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBD merupakan salah satu parameter kinerja organisasi pemerintah daerah yang mendapat perhatian utama dari para pemangku kepentingan (Mardiasmo, 2002). Devas (dikutip dari Haryanto, 2013) menjelaskan bahwa Informasi SiLPA APBD yang ada dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan salah satu indikator bagi rekanan pemerintah daerah dalam membuat keputusan perencanaan investasi. Sementara, informasi arus kas pemerintah daerah diyakini mampu memberikan informasi untuk membantu para pemilik kepentingan dalam memprediksi arus kas yang akan didistribusikan oleh pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahannya di masa yang akan datang.

Dalam penelitiannya, Haryanto (2013) menggunakan variabel penganggaran belanja modal untuk mengukur kekuatan hubungannya dengan informasi SiLPA APBD dan arus kas. Penggunaan variabel penganggaran belanja modal dimaksudkan untuk mengetahui komitmen pemerintah daerah dalam membangun perekonomian daerahnya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sularso (2011) menyatakan bahwa alokasi belanja modal yang ditetapkan oleh pemerintah daerah merupakan salah satu hal yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah. Menurut Halim (dikutip dari Badrudin, 2012), belanja modal adalah investasi berupa pembelian aset yang memiliki masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan

yang bermanfaat secara ekonomis, sosial, dan manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam melayani masyarakat.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Haryanto (2013) menunjukkan bahwa pada pemerintah daerah klaster a dan c, SiLPA APBD dan arus kas investasi berpengaruh secara signifikan terhadap penganggaran belanja modal. Sementara pada pemerintah daerah klaster b tidak terdapat variabel yang secara parsial mempengaruhi penganggaran belanja modal. Namun, penelitian tersebut masih memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan sampel sebanyak 54 pemerintah daerah kabupaten di Indonesia.

Penelitian yang memasukkan faktor klasifikasi kemampuan keuangan daerah dalam kaitannya dengan siklus hidup perusahaan masih relatif sedikit dilakukan di Indonesia. Penelitian terkait siklus hidup perusahaan terkait dengan pengukuran kinerja perusahaan masih banyak dilakukan terhadap sektor bisnis. Penelitian-penelitian tersebut antara lain penelitian yang dilakukan oleh Black (1998) yang memperoleh bukti empiris bahwa *value-relevant* dari ukuran kinerja perusahaan berupa laba dan arus kas dipengaruhi oleh siklus hidup perusahaan. Selanjutnya, Ekawati (2005) mendapatkan bukti empiris bahwa siklus hidup perusahaan berpengaruh terhadap penciptaan nilai perusahaan dalam hubungannya dengan tingkat pertumbuhan penjualan. Selain itu, San Susanto dan Erni Ekawati (2006) juga mendapatkan bukti empiris bahwa Siklus hidup perusahaan berpengaruh terhadap penambahan *value-relevance* dari laba dan arus kas.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan penelitian yang dilakukan oleh Haryanto (2013) mengenai pengaruh SiLPA APBD dan Informasi Arus Kas dari aktivitas Operasi, Investasi, dan Pembiayaan terhadap pemerintah daerah dengan kemampuan pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2007. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian berjudul **“Hubungan Informasi SiLPA APBD dan Arus Kas dengan Penganggaran Belanja Modal Pemerintah Kabupaten di Indonesia berdasarkan Klaster Permendagri Nomor 21 Tahun 2007”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dari masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah informasi SILPA APBD berpengaruh signifikan terhadap Penganggaran Belanja Modal pada klaster pemerintah daerah yang berbeda?
2. Apakah informasi arus kas dari aktivitas operasi berpengaruh signifikan terhadap Penganggaran Belanja Modal pada klaster pemerintah daerah yang berbeda?
3. Apakah informasi arus kas dari aktivitas investasi berpengaruh signifikan terhadap Penganggaran Belanja Modal pada klaster pemerintah daerah yang berbeda?

4. Apakah informasi arus kas dari aktivitas pembiayaan berpengaruh signifikan terhadap Penganggaran Belanja Modal pada klaster pemerintah daerah yang berbeda?

### **1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Bagian ini akan menjelaskan tujuan dan kegunaan dari penelitian. Tujuan penelitian merupakan hasil dari penguraian rumusan masalah yang telah ditetapkan, sementara kegunaan penelitian merupakan manfaat yang akan diterima oleh peneliti, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan laporan keuangan pemerintah daerah.

#### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan penjelasan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisis dan memberikan bukti empiris pengaruh informasi SiLPA APBD terhadap Penganggaran Belanja Modal pada klaster pemerintah daerah yang berbeda.
2. Menganalisis dan memberikan bukti empiris pengaruh informasi Arus Kas dari aktivitas Operasi terhadap Penganggaran Belanja Modal pada klaster pemerintah daerah yang berbeda.
3. Menganalisis dan memberikan bukti empiris pengaruh informasi Arus Kas dari aktivitas Investasi terhadap Penganggaran Belanja Modal pada klaster pemerintah daerah yang berbeda.

4. Menganalisis dan memberikan bukti empiris pengaruh informasi Arus Kas dari aktivitas Pembiayaan terhadap Penganggaran Belanja Modal pada klaster pemerintah daerah yang berbeda.

### **1.3.2. Kegunaan Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berikut:

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu Akuntansi Pemerintahan tentang pengaruh dari SiLPA APBD dan laporan arus kas pemerintah daerah.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sebagai bahan informasi dan masukan untuk mengembangkan potensi daerah sesuai dengan kemampuan keuangan berdasarkan informasi dari SiLPA APBD dan laporan arus kas pemerintah daerah.

3. Bagi pemangku kepentingan laporan keuangan daerah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi untuk mengambil keputusan dan kebijakan berdasarkan informasi dari SiLPA APBD dan laporan arus kas pemerintah daerah.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini disusun atas lima bab agar memiliki susunan yang sistematis serta dapat memudahkan untuk mengetahui dan memahami hubungan antara bab

yang satu dengan bab lainnya sebagai suatu rangkaian yang konsisten. Sistematika yang dimaksud adalah sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang pendahuluan yang menguraikan latar belakang ditulisnya karya ilmiah ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

### **BAB II : TELAAH PUSTAKA**

Bab ini menguraikan landasan teori yang mendasari tiap-tiap variabel, ringkasan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

### **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang deskripsi dan definisi operasional variabel-variabel penelitian, penentuan populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

### **BAB IV : PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan tentang deskripsi objek penelitian, analisis data, interpretasi hasil dan argumentasi terhadap hasil penelitian.

### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh dari hasil pengolahan data penelitian. Selain itu, dalam bab ini juga berisi saransaran bagi penelitian lainnya.

## **BAB II**

### **TELAAH PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1. Teori Sinyal**

Teori sinyal (*signalling theory*) merupakan teori yang menjelaskan bagaimana seharusnya manajemen memberikan sinyal kepada para pengguna laporan keuangan. Watts (dikutip oleh Jama'an, 2008) menjelaskan bahwa manajer memberikan informasi melalui laporan keuangan bahwa mereka menerapkan kebijakan akuntansi konservatisme yang menghasilkan laba lebih berkualitas karena prinsip ini mencegah perusahaan melakukan tindakan membesar-besarkan laba dan membantu pengguna laporan keuangan dengan menyajikan laba dan aktiva yang tidak *overstate*.

Selain itu, Brigham (dikutip oleh Jama'an, 2008) menyatakan bahwa integritas dari laporan keuangan yang merupakan sinyal positif dapat mempengaruhi opini investor dan kreditor atau pihak lain yang berkepentingan. Dalam *signalling theory*, pengeluaran investasi dapat memberikan sinyal positif tentang pertumbuhan di masa yang akan datang, sehingga dapat meningkatkan harga saham sebagai indikator perusahaan. Selain itu, adanya peningkatan utang dapat diartikan bahwa perusahaan memiliki kemampuan pembayaran kewajiban di masa yang akan datang.

Sementara itu, Haryanto (2013) menjelaskan hal yang dibahas dalam teori sinyal adalah mengenai bagaimana seharusnya keberhasilan atau kegagalan pihak

manajemen suatu organisasi baik perusahaan maupun pemerintah daerah dapat disampaikan kepada para pemangku kepentingan atau pemegang saham. Black (dikutip oleh Haryanto, 2013) menyebutkan bahwa inti argumentasi dari teori sinyal (*signalling theory*) adalah adanya dorongan atau faktor ekonomi untuk melakukan suatu hal, meskipun hal buruk, dalam rangka membuat laporan keuangan.

### **2.1.2. Teori Siklus Hidup Perusahaan**

Dalam penelitiannya, Black (1998) menggunakan teori siklus hidup perusahaan (*corporate life-cycle theory*) sebagai pengembangan dari konsep *life-cycle* produk yang dikembangkan dalam ilmu pemasaran dan ekonomi mikro oleh Rink dan Swan (1979) serta Mueller (1972). Black (dikutip oleh Saraswati, 2007) dan Ekawati (2005) menggunakan siklus hidup perusahaan yang digunakan oleh Pashley dan Philippatos (1990) yang terdiri dari empat tahap yaitu *pioneering*, *expansion*, *maturity*, dan *decline*. Black menggunakan istilah *start-up* untuk mengganti istilah tahap *pioneering*, dan istilah *growth* untuk mengganti istilah tahap *expansion*. Sementara, Ekawati mengganti istilah tahap *pioneering* dengan istilah tahap *phases-introduction*. Pada pembagian tahapan berikutnya, mereka masih menggunakan istilah yang sama untuk tahapan *maturity* dan *decline*.

Manurut Pashley dan Philippatos (dikutip dari Saraswati, 2007) tahapan *growth* merupakan tahap pada saat perusahaan mengalami peningkatan dalam jumlah penjualan, laba, likuiditas, dan aktivitas pembiayaan. Pada tahap ini rasio *assets in place* perusahaan akan lebih besar dibandingkan dengan tahap sebelumnya, yaitu tahap *start-up/pioneering*.

Pashley dan Philippatos (dikutip dari Saraswati, 2007) kemudian mendefinisikan tahap *mature* sebagai tahap kematangan produk dan kompetensi yang tinggi. Pada tahap ini, perusahaan akan berada pada titik puncak jumlah penjualan dan memiliki tingkat likuiditas yang tinggi. Namun, perusahaan akan mengalami penurunan laba karena persaingan harga serta mengalami kelangkaan investasi.

Pada tahap terakhir, yaitu tahap *decline*, Pashley dan Philippatos (dikutip dari Saraswati, 2007) menjelaskan bahwa perusahaan akan mengalami penurunan permintaan produk, *market share* yang rendah, dan akan mengalami kerugian. Pada tahap ini, *value* dari *assets in place* akan sangat besar karena perusahaan menjual aktiva yang tidak produktif.

### **2.1.3. Klaster Kemampuan Keuangan Daerah**

Dalam penelitiannya terhadap pemerintah kabupaten, Haryanto (2013) menggunakan teori siklus hidup perusahaan dalam membagi klaster tahapan kemampuan pemerintah kabupaten. Penerapan teori siklus hidup perusahaan dalam klasifikasi kemampuan pemerintah kabupaten tersebut menggunakan dasar Permendagri Nomor 21 Tahun 2007.

Dalam peraturan tersebut, kemampuan keuangan daerah terbagi menjadi tiga kelompok yaitu: tinggi, sedang, dan rendah dengan pembagian sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah dengan kemampuan di atas Rp400.000.000.000,00 (empat ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada kemampuan

keuangan daerah tinggi, dalam penelitian ini akan disebut sebagai klaster a.

2. Pemerintah daerah dengan kemampuan antara Rp200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp400.000.000.000,00 (empat ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah sedang, dalam penelitian ini akan disebut sebagai klaster b.
3. Pemerintah daerah dengan kemampuan di bawah Rp200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah rendah, dalam penelitian ini akan disebut sebagai klaster c.

Jika dihubungkan dengan teori siklus hidup perusahaan, maka pemerintah pada kelompok klaster a merupakan penerapan dari tahap *mature*. Pada tahap ini, pemerintah daerah sedang dalam masa puncaknya, memiliki infrastruktur lebih banyak, dan kapasitas keuangan yang kuat (Haryanto, 2013).

Klaster b merupakan cerminan dari tahap *growth*. Menurut Haryanto (2013), kondisi pemerintah daerah pada kelompok klaster ini sedang mengalami perkembangan investasi. Pemerintah daerah telah memiliki jumlah aset (*assets in place*) lebih banyak daripada pemerintah daerah klaster c karena telah mendapatkan sumber pembiayaan.

Klaster c merupakan klaster terbawah dan gambaran dari tahap *start-up*. Tahap ini merupakan tahap di mana pemerintah daerah baru terbentuk atau melepaskan diri dari pemerintah induknya. Menurut Haryanto (2013), pada tahap

ini pemerintah daerah banyak melakukan pengeluaran kas untuk pembangunan fisik (infrastruktur), peninjauan investasi langsung dari sektor swasta ke pemerintah daerah, dan ekstensifikasi sumber pendapatan asli daerah (PAD).

Tahap *decline* tidak bisa diterapkan dalam penelitian ini karena pada prinsipnya pemerintah daerah tidak pernah mengalami kerugian seperti yang dialami oleh perusahaan. Selain itu, tujuan dari pemerintah daerah dalam menjalankan fungsinya adalah untuk memberikan pelayanan sebagaimana organisasi sektor publik, bukan untuk mencari laba.

## **2.2. Penelitian Terdahulu**

Pada tahun 1998, Ervin L. Black melakukan penelitian tentang perbandingan mana yang lebih memiliki keterkaitan nilai dalam pengukuran akuntansi antara laba dan arus kas (*cash flows*) dalam hubungannya dengan siklus hidup perusahaan. Dalam penelitiannya tersebut, Black menemukan bahwa pada saat perusahaan mencapai siklus kematangan (*mature*), laba lebih memiliki *value-relevant* dibandingkan dengan arus kas. Tetapi, pada saat perusahaan baru beroperasi (*start-up stage*), arus kas dari aktivitas investasi yang lebih memiliki *value-relevant*. Sementara, ketika perusahaan mencapai tahap pertumbuhan (*growth stage*), arus kas dari aktivitas operasi yang memiliki *value-relevant*.

Tahun 2005, Erni Ekawati melakukan penelitian mengenai hubungan antara tingkat pertumbuhan dan profitabilitas akuntansi dalam kaitannya dengan strategi penciptaan nilai perusahaan. Pada penelitian ini, Ekawati menemukan bahwa pertumbuhan penjualan sampai dengan level tertentu akan meningkatkan nilai perusahaan. Tetapi, jika pertumbuhan penjualan melampaui level tersebut,

justru akan menimbulkan efek sebaliknya. Pada tahap itulah perusahaan berada pada siklus yang dinamakan tahap penurunan (*decline stage*).

Ninna Daniati dan Suhairi pada tahun 2006 melakukan penelitian mengenai seberapa besar pengaruh informasi laporan arus kas, laba kotor, dan ukuran perusahaan terhadap *expected return saham* pada industri tekstil dan otomotif. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa arus kas dari aktivitas investasi, laba kotor, dan ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap *expected return* saham.

Penelitian terkait siklus hidup perusahaan juga dilakukan oleh San Susanto dan Erni Ekawati pada tahun 2006 terkait dengan relevansi nilai informasi laba dan aliran kas terhadap harga saham. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa pada tahap *start-up*, harga saham dipengaruhi oleh arus kas dari aktivitas investasi dan pembiayaan. Pada tahap *growth*, harga saham lebih dipengaruhi oleh laba, arus kas dari aktivitas operasi, dan arus kas dari aktivitas investasi. Pada tingkat kematangan perusahaan (*mature stage*), baik pendapatan maupun semua informasi arus kas mempengaruhi harga saham. Sementara, pada tahap *decline*, harga saham lebih dipengaruhi oleh arus kas dari aktivitas operasi dan pembiayaan. Berdasarkan hasil penelitian yang mereka lakukan, mereka menyimpulkan bahwa siklus hidup perusahaan berpengaruh terhadap penambahan *value-relevance* dari laba dan arus kas.

Terkait dengan belanja modal, pada tahun 2011 Havid Sularso dan Yanuar E. Restianto melakukan penelitian mengenai pengaruh kinerja keuangan terhadap alokasi belanja modal dan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Dalam penelitiannya, mereka menggunakan kinerja keuangan daerah untuk menunjukkan kemampuan keuangan daerah. Sementara, alokasi belanja modal merupakan salah satu hal yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah. Hasil penelitian yang mereka lakukan menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah mempengaruhi alokasi belanja modal daerah yang artinya secara tidak langsung kinerja keuangan daerah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah.

Pada tahun 2013, Haryanto mengaplikasikan teori mengenai siklus hidup perusahaan ke dalam pemerintah daerah dalam kaitannya dengan melihat pengaruh SiLPA APBD dan arus kas terhadap penganggaran belanja modal. Penerapan siklus hidup perusahaan yang dilakukan Haryanto terhadap pemerintah daerah dengan membagi pemerintah daerah ke dalam klaster-klaster berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2007. Dari hasil penelitiannya, Haryanto menemukan bahwa pada pemerintah daerah klaster a dan c, SiLPA APBD dan arus kas investasi berpengaruh secara signifikan terhadap penganggaran belanja modal. Sementara, pada pemerintah daerah klaster b tidak terdapat variabel yang secara parsial mempengaruhi penganggaran belanja modal.

Berikut ini akan disajikan ringkasan dari daftar penelitian sebelumnya yang telah diuraikan dalam tabel 2.1.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

| <b>Nama dan Tahun Penelitian</b> | <b>Judul Penelitian</b>   | <b>Hasil Penelitian</b>  |
|----------------------------------|---|--|
| Ervin L. Black (1998)            | <i>Which is More Value Relevant: Earnings or Cash Flows? A Life Cycle Examination</i> | Perusahaan pada tahap <i>start-up</i> , <i>value-relevant</i> terdapat pada arus kas investasi. Pada tahap <i>growth</i> , yang lebih memiliki <i>value-relevant</i> adalah arus kas |

| Nama dan Tahun Penelitian                   | Judul Penelitian  | Hasil Penelitian   |
|---|---|--|
|   |   | operasi. Sementara pada kondisi matang perusahaan ( <i>mature</i> ), laba ( <i>earnings</i> ) yang lebih memiliki <i>value-relevant</i> .  |
| Erni Ekawati (2005)                         | <i>Level of Growth and Accounting Profitability in Corporate Value Creation Strategy</i>  | Pertumbuhan penjualan sampai dengan level tertentu akan meningkatkan nilai perusahaan. Tetapi, jika pertumbuhan penjualan melampaui level tersebut, justru akan menimbulkan efek sebaliknya.   |
| Ninna Daniati dan Suhairi (2006)            | <i>Pengaruh Kandungan Informasi Komponen Arus Kas, Laba Kotor, dan Size Perusahaan terhadap Expected Return Saham</i>   | Arus kas dari aktivitas investasi, laba kotor, dan ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap <i>expected return</i> saham.  |
| San Susanto dan Erni Ekawati (2006)         | <i>Relevansi Nilai Informasi Laba dan ALiran Kas terhadap Harga Saham dalam Kaitannya dengan Siklus Hidup Perusahaan</i>  | Siklus hidup perusahaan berpengaruh terhadap penambahan <i>value-relevance</i> dari laba dan arus kas.   |
| Havid Sularso dan Yanuar E Restianto (2011) | <i>Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah</i>   | Kinerja keuangan daerah (kemampuan keuangan daerah) mempengaruhi alokasi belanja modal daerah yang secara tidak langsung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah.  |
| Haryanto (2013)                             | <i>Pengaruh Informasi SiLPA APBD dan Arus Kas terhadap Penganggaran Belanja Modal berdasarkan klasifikasi Pemerintah Daerah menurut Permendagri Nomor 21 Tahun 2007</i> | Pada pemerintah daerah kluster a dan c, SiLPA APBD dan arus kas investasi berpengaruh secara signifikan terhadap penganggaran belanja modal. Sementara, pada pemerintah daerah kluster b tidak terdapat variabel yang secara parsial mempengaruhi penganggaran belanja modal |

Sumber: Diringkas dari berbagai jurnal ilmiah.

Penelitian ini merupakan replikasi penelitian yang dilakukan oleh Haryanto (2013), dengan menggunakan objek penelitian pemerintah daerah kabupaten di Indonesia. Pemilihan pemerintah daerah berbentuk kabupaten karena memiliki jumlah yang lebih besar dan terdapat di hampir semua provinsi di Indonesia sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran secara menyeluruh pola kebijakan penganggaran belanja modal pada pemerintah daerah di Indonesia. Alasan penulis melakukan replikasi adalah untuk menguji kembali apakah terdapat hubungan antara informasi SiLPA APBD dan arus kas terhadap penganggaran belanja modal apabila menggunakan seluruh data populasi pemerintah daerah kabupaten di Indonesia.

### **2.3. Kerangka Pemikiran**

Teori sinyal menjelaskan bagaimana pihak organisasi (perusahaan atau pemerintah) menyusun laporan keuangan sebagai sarana untuk memberikan informasi kepada para pemegang kepentingan mengenai aktivitas yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Dalam teori ini, Brigham (dikutip dari Jama'an, 2008) menjelaskan bahwa pengeluaran investasi menyatakan adanya sinyal positif yang mengindikasikan terdapat pertumbuhan organisasi di masa yang akan datang.

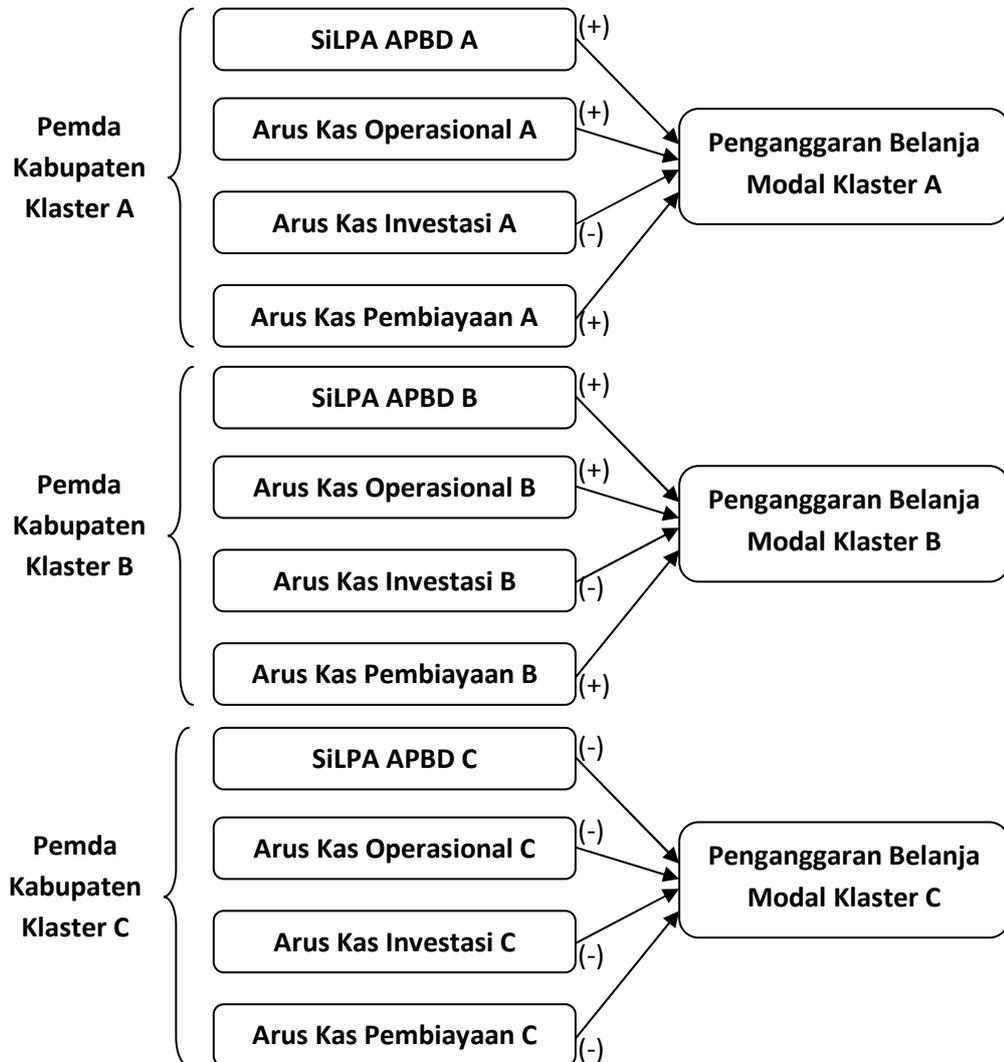
Sementara, teori siklus hidup perusahaan membagi tahap perkembangan perusahaan ke dalam empat tahap yaitu *pioneering*, *expansion*, *maturity*, dan *decline*. Tahap *pioneering/start-up* menggambarkan perusahaan yang baru memulai usaha, tahap *expansion/growth* menunjukkan perusahaan yang sedang berkembang dan mengalami perluasan, tahap *maturity/mature* menunjukkan

perusahaan yang sedang dalam masa puncak kematangan, sementara tahap *decline* merupakan tahap dimana perusahaan mengalami masa penurunan.

Sejalan dengan teori-teori tersebut, pemerintah sebagai salah satu bentuk organisasi memiliki kewajiban untuk menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut nantinya akan berguna bagi para pengambil keputusan, pembuat kebijakan, dan para pemangku kepentingan lainnya. Kinerja dari pemerintah tersebut dapat diukur melalui variabel-variabel seperti SiLPA dan Arus Kas dari aktivitas operasi, investasi, serta pembiayaan. Sementara, untuk melihat sinyal positif dari perkembangan pemerintah di masa yang akan datang dapat dilihat dari penganggaran belanja modalnya. Untuk melihat tahapan siklus hidup pemerintah, penelitian ini menggunakan Permendagri No. 21 Tahun 2007 sebagai dasar klasifikasi kemampuan keuangan daerah pemerintah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana variabel SiLPA APBD serta Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Investasi, dan Pembiayaan terhadap Penganggaran Belanja Modal pada Pemerintah Daerah yang diklasifikasikan pada masing-masing klaster berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2007. Secara garis besar, gambaran kerangka penelitian ini ditampilkan dalam gambar 2.1 berikut.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**



#### 2.4. Hipotesis

Hipotesis bisa didefinisikan sebagai hubungan yang diperkirakan secara logis di antara dua atau lebih variabel yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji (Sekaran, 2011). Dalam penelitian ini, hipotesis yang dirumuskan terkait dengan pengaruh informasi SiLPA APBD serta Arus Kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pembiayaan terhadap penganggaran belanja modal.

#### **2.4.1. Pengaruh Informasi SiLPA APBD terhadap penganggaran Belanja Modal**

Pemerintah daerah yang berada dalam klaster c memiliki kemampuan keuangan yang lebih kecil dibandingkan dengan pemerintah daerah dalam klaster lainnya. Pada klaster ini, pemerintah daerah cenderung memiliki anggaran pengeluaran belanja lebih besar dibandingkan dengan penerimaannya, sehingga pemerintah daerah tersebut akan melaporkan sisa lebih perhitungan APBD (SiLPA APBD) dengan jumlah yang relatif kecil. Namun, meskipun memiliki SiLPA APBD yang kecil, pemerintah daerah dalam klaster ini akan berusaha untuk meningkatkan potensinya untuk bertumbuh dan mengembangkan infrastrukturnya dengan jalan meningkatkan jumlah anggaran pada belanja modal.

Pemerintah daerah dalam klaster b memiliki kecenderungan berada dalam tahap perkembangan investasi. Pemerintah daerah tersebut sudah mulai mengalami peningkatan jumlah pendapatan daerah. Selain itu, pemerintah daerah dalam klaster b lebih cenderung memiliki aset lebih banyak dari pemerintah daerah dalam klaster c. Oleh karena itu, SiLPA APBD pemerintah klaster b cenderung lebih besar dibandingkan dengan pemerintah daerah klaster c. Namun, pemerintah daerah dalam klaster b juga tetap berupaya untuk mengembangkan daerahnya dengan menganggarkan belanja modal lebih banyak.

Menurut Haryanto (2013), pemerintah daerah pada klaster a memiliki infrastruktur yang lebih banyak dan kapasitas keuangan yang kuat sehingga memiliki SiLPA APBD dalam jumlah yang relatif lebih besar dibandingkan dengan pemerintah daerah pada klaster b dan klaster c. Dengan SiLPA yang besar,

maka pemerintah daerah tersebut akan memiliki kemampuan yang besar dengan membangun kembali infrastrukturnya. Oleh karena itu, diharapkan terdapat hubungan yang positif antara besarnya SiLPA dengan penganggaran belanja modalnya. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian Black (1998) yang mengungkapkan terdapat pengaruh positif yang signifikan terhadap kemampuan keuangan perusahaan pada tahapan *mature*.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut, maka penulis dapat merumuskan hipotesis-hipotesis terkait hubungan SiLPA APBD dengan penganggaran belanja modal sebagai berikut:

H<sub>1a</sub> : Terdapat pengaruh positif yang signifikan antara informasi SiLPA APBD terhadap penganggaran belanja modal pada pemerintah daerah klaster a.

H<sub>1b</sub> : Terdapat pengaruh positif yang signifikan antara informasi SiLPA APBD terhadap penganggaran belanja modal pada pemerintah daerah klaster b.

H<sub>1c</sub> : Terdapat pengaruh negatif yang signifikan antara informasi SiLPA APBD terhadap penganggaran belanja modal pada pemerintah daerah klaster c.

#### **2.4.2. Pengaruh Informasi Arus Kas dari Aktivitas Operasi terhadap Penganggaran Belanja Modal**

Pada sisi bisnis, Aktivitas Operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan perusahaan (*principal revenue activities*) dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan (Daniati dan Suhairi, 2006).

Selain itu, arus kas dari aktivitas operasi juga memberikan informasi yang relevan tentang jumlah dan risiko arus kas *assets in place* (Saraswati, 2007). Sementara, dari sisi pemerintah, arus kas bersih aktivitas operasi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 adalah aktivitas utama yang menunjukkan kemampuan operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Haryanto (2013) menyebutkan bahwa arus kas operasi pemerintah daerah yang berada pada klaster c diasumsikan bernilai negatif karena pemerintah daerah masih dalam taraf akan membangun infrastruktur dan belum mampu menghasilkan arus kas masuk dari aktivitas operasi dalam jumlah yang besar dibandingkan dengan arus kas keluarnya. Meskipun begitu, pemerintah daerah pada klaster c justru akan berupaya untuk membangun infrastrukturnya untuk membuka kesempatan peningkatan pertumbuhan ekonominya. Oleh karena itu, pemerintah daerah pada klaster c akan cenderung memiliki anggaran belanja modal yang tinggi meskipun memiliki arus kas dari aktivitas operasi yang kecil.

Pada klaster b, pemerintah daerah umumnya sudah mampu memperoleh pendapatan asli daerah (PAD) serta menghasilkan arus kas operasi yang positif meski masih relatif kecil (Haryanto, 2013). Pemerintah daerah pada klaster b cenderung lebih mapan dibandingkan dengan pemerintah daerah pada klaster c, sehingga memiliki arus kas dari aktivitas operasi yang lebih besar. Pemerintah daerah pada klaster b juga tetap berusaha meningkatkan pembangunan infrastruktur mereka melalui penganggaran belanja modal yang tinggi. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Black (1998) yang

menemukan terdapat hubungan positif yang signifikan antara arus kas operasi perusahaan pada tahap *growth* dengan kemampuan keuangannya.

Pemerintah daerah yang berada pada klaster a cenderung sudah berada dalam posisi mapan. Pendapatan asli daerah (PAD) yang dihasilkan oleh pemerintah daerah sudah relatif tinggi sehingga arus kas dari aktivitas operasi cenderung lebih besar dibandingkan dengan pemerintah daerah pada klaster b dan klaster c. Dengan besarnya arus kas dari aktivitas operasi, diharapkan kemampuan pemerintah daerah untuk meningkatkan infrastruktur melalui belanja modal juga meningkat. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Black (1998) bahwa pada tahap *mature*, arus kas aktivitas operasi berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan perusahaan.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut, penulis merumuskan hipotesis-hipotesis terkait pengaruh informasi arus kas dari aktivitas operasi terhadap penganggaran belanja modal sebagai berikut:

H<sub>2a</sub> : Terdapat pengaruh positif yang signifikan antara informasi arus kas dari aktivitas operasi terhadap penganggaran belanja modal pada pemerintah daerah klaster a.

H<sub>2b</sub> : Terdapat pengaruh positif yang signifikan antara informasi arus kas dari aktivitas operasi terhadap penganggaran belanja modal pada pemerintah daerah klaster b.

H<sub>2c</sub> : Terdapat pengaruh negatif yang signifikan antara informasi arus kas dari aktivitas operasi terhadap penganggaran belanja modal pada pemerintah daerah klaster c.

### **2.4.3. Pengaruh Informasi Arus Kas dari Aktivitas Investasi terhadap Penganggaran Belanja Modal**

Dari sisi bisnis, aktivitas investasi adalah aktivitas yang menyangkut perolehan atau pelepasan aktiva jangka panjang (aktiva tidak lancar) serta investasi lain yang tidak termasuk dalam setara kas, serta memperoleh dan menjual investasi dan aktiva jangka panjang produktif (Daniati dan Suhairi, 2006). Menurut Saraswati (2007), arus kas dari aktivitas investasi memberikan sedikit informasi mengenai *future cash flow* dari risiko *asset in place* karena informasi arus kas dari aktivitas investasi menggambarkan *future growth opportunities*. Jadi, semakin besar pengeluaran kas untuk aktivitas investasi atau semakin negatif nilai informasi arus kas dari aktivitas investasi artinya perusahaan sedang melakukan ekspansi dan membuka peluang untuk terus tumbuh dan berkembang.

Dari sisi pemerintahan, Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 menyebut arus kas dari aktivitas investasi sebagai arus kas dari aktivitas investasi non keuangan. Arus kas tersebut mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Jika pemerintah daerah berusaha untuk meningkatkan kapasitas infrastrukturnya dengan meningkatkan penganggaran belanja modalnya, maka arus kas dari aktivitas investasi akan menghasilkan jumlah yang kecil. Artinya, arus kas dari aktivitas investasi ini diharapkan berpengaruh negatif terhadap penganggaran belanja modal. Hal tersebut berlaku

pada semua pemerintah daerah, baik yang terdapat pada klaster a, klaster b, maupun klaster c.

Hal tersebut sesuai dengan hasil pengujian Black (1998) yang menemukan terdapat pengaruh negatif yang signifikan pada arus kas dari aktivitas investasi terhadap kemampuan keuangan perusahaan pada tahap *start-up* dan *growth*. Namun, arus kas dari aktivitas investasi berpengaruh positif tidak signifikan pada perusahaan tahap *mature*.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis dapat menarik beberapa hipotesis terkait pengaruh arus kas dari aktivitas investasi terhadap penganggaran belanja modal sebagai berikut:

H<sub>3a</sub> : Terdapat pengaruh negatif yang signifikan antara informasi arus kas dari aktivitas investasi terhadap penganggaran belanja modal pada pemerintah daerah klaster a.

H<sub>3b</sub> : Terdapat pengaruh negatif yang signifikan antara informasi arus kas dari aktivitas investasi terhadap penganggaran belanja modal pada pemerintah daerah klaster b.

H<sub>3c</sub> : Terdapat pengaruh negatif yang signifikan antara informasi arus kas dari aktivitas investasi terhadap penganggaran belanja modal pada pemerintah daerah klaster c.

#### **2.4.4. Pengaruh Informasi Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan terhadap Penganggaran Belanja Modal**

Dari sisi bisnis, Daniati dan Suhairi (2006) mendefinisikan aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta

komposisi ekuitas dan pinjaman perusahaan. Saraswati (2007) menjelaskan bahwa manfaat arus kas dari aktivitas pendanaan tersebut adalah memberikan informasi tentang bagaimana kemampuan *assets in place* perusahaan dalam menghasilkan kas untuk membayar hutang dan memperoleh tambahan dana.

Dari sisi pemerintahan, aktivitas pendanaan merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang. Pemerintah daerah, baik pada klaster a, klaster b, maupun klaster c akan tetap membutuhkan dana untuk pembangunan infrastrukturnya dengan harapan pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan maksimal bagi masyarakatnya. Oleh karena itu, diharapkan arus kas dari aktivitas pendanaan ini memiliki nilai yang besar. Dengan dana yang mencukupi, pemerintah daerah juga memiliki kemampuan untuk meningkatkan penganggaran belanja modalnya. Sehingga diharapkan arus kas dari aktivitas pendanaan tersebut memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap penganggaran belanja modal.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Black (1998). Pada penelitian tersebut, arus kas dari aktivitas pendanaan memiliki pengaruh positif terhadap kemampuan keuangan perusahaan pada berbagai tahapan. Pada tahap *growth* dan *mature*, arus kas tersebut memiliki pengaruh positif yang signifikan. Sementara pada tahap *start-up*, arus kas dari aktivitas pendanaan memiliki pengaruh positif yang tidak signifikan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis menarik beberapa hipotesis terkait pengaruh arus kas dari aktivitas pendanaan sebagai berikut:

H<sub>4a</sub> : Terdapat pengaruh positif yang signifikan antara informasi arus kas dari aktivitas pembiayaan terhadap penganggaran belanja modal pada pemerintah daerah klaster a.

H<sub>4b</sub> : Terdapat pengaruh positif yang signifikan antara informasi arus kas dari aktivitas pembiayaan terhadap penganggaran belanja modal pada pemerintah daerah klaster b.

H<sub>4c</sub> : Terdapat pengaruh positif yang signifikan antara informasi arus kas dari aktivitas pembiayaan terhadap penganggaran belanja modal pada pemerintah daerah klaster c.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional**

Penelitian ini mencoba menguji variabel-variabel independen dan variabel dependen seperti yang telah digambarkan pada kerangka pemikiran. Variabel dependen untuk penelitian ini adalah Penganggaran Belanja Modal pada APBD saat tanggal pelaporan keuangan Tahun Anggaran 2011. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah informasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran APBD (SiLPA APBD) dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pemerintah kabupaten Tahun Anggaran 2011, Laporan Arus Kas operasi, investasi, dan pembiayaan Tahun Anggaran 2011.

##### **3.1.1. Belanja Modal**

Belanja Modal adalah pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya lebih dari satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan berakibat menambah belanja yang bersifat rutin (Sularso dan Restianto, 2011). Dalam penelitiannya, Sularso dan Restianto (2011) membagi klasifikasi belanja modal ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok belanja modal yang termasuk dalam belanja publik yaitu belanja modal yang manfaatnya bisa langsung dinikmati dan dirasakan oleh masyarakat. Contoh dari belanja modal kelompok ini adalah pembangunan jalan dan jembatan, pembelian mobil ambulans untuk digunakan sebagai fasilitas umum, dan sebagainya. Kelompok kedua adalah belanja modal aparatur. Kelompok ini merupakan belanja modal

yang manfaatnya tidak langsung dinikmati oleh masyarakat, tetapi dirasakan langsung oleh aparatur negara. Contohnya adalah belanja pembangunan gedung pemerintah, pengadaan kendaraan dinas, dan lain-lain.

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 menyebutkan definisi dari belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, buku perpustakaan, dan hewan. Pernyataan No. 02 SAP tentang Laporan Realisasi Anggaran mendefinisikan belanja modal sebagai pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Pernyataan ini juga membagi klasifikasi belanja pemerintah menurut ekonomi ke dalam dua jenis belanja yaitu belanja operasi dan belanja modal.

Sularso dan Restianto (2011) berpendapat bahwa belanja modal berkaitan erat dengan investasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Menurut Halim (dikutip oleh Sularso dan Restianto, 2011), dalam mengartikan investasi bisa dilakukan dengan berbagai macam sudut pandang atau konteks mengartikannya. Secara akuntansi pada konteks jenis belanja/biaya, investasi muncul karena adanya perbedaan *revenue expenditure* dan *capital expenditure*. Belanja modal dapat digolongkan ke dalam investasi karena pengertian belanja modal tersebut dapat dikategorikan sebagai *capital expenditure*.

### **3.1.2. Informasi SiLPA**

SiLPA APBD merupakan bagian dari Laporan Realisasi Anggaran yang dilaporkan oleh pemerintah pada tahun anggaran bersangkutan. Pernyataan No. 02 SAP tentang Laporan Realisasi Anggaran berbasis Kas menyebutkan bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Menurut Devas (yang dikutip oleh Haryanto, 2013) SiLPA APBD menjadi salah satu indikator bagi rekanan pemerintah daerah dalam membuat keputusan perencanaan investasi.

### **3.1.3. Informasi Arus Kas**

Lampiran I.04 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010, Pernyataan No. 03 Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) tentang Laporan Arus Kas menyebutkan bahwa Laporan arus kas bertujuan untuk memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama suatu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

Pernyataan No. 03 SAP tersebut juga menyebutkan manfaat dari informasi arus kas adalah:

- a. Sebagai indikator jumlah arus kas di masa yang akan datang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya.
- b. Menjadi alat pertanggung-jawaban arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode pelaporan.
- c. Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan lainnya, laporan arus kas memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan

dalam mengevaluasi perubahan kekayaan bersih/ekuitas suatu entitas pelaporan dan struktur keuangan pemerintah (termasuk likuiditas dan solvabilitas).

Dalam penyajiannya, Laporan Arus Kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

#### **3.1.3.1. Informasi Arus Kas Aktivitas Operasi**

Pernyataan No. 03 SAP menyebutkan definisi Aktivitas Operasi adalah penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Arus kas ini merupakan indikator yang menunjukkan pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Darise (2008) menjelaskan bahwa penerimaan-penerimaan yang dilaporkan sebagai arus kas masuk dari aktivitas operasi ini harus merupakan pendapatan pada periode akuntansi yang bersangkutan. Pernyataan No. 03 SAP menyebutkan penerimaan-penerimaan pemerintah yang dilaporkan sebagai arus kas masuk dari aktivitas operasi terdiri dari:

- a. Penerimaan Perpajakan.
- b. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
- c. Penerimaan Hibah.
- d. Penerimaan Bagian Laba Perusahaan negara/daerah dan investasi lainnya.

- e. Penerimaan lain-lain/penerimaan dari pendapatan luar biasa.
- f. Penerimaan Transfer.

Darise (2008) juga menjelaskan bahwa pengeluaran belanja yang dilakukan oleh pemerintah dan dilaporkan ke dalam arus kas keluar dari aktivitas operasi harus merupakan pengeluaran yang dilakukan pada periode yang bersangkutan. Pernyataan No. 03 SAP menyebutkan pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang merupakan bagian dari Arus kas keluar terdiri dari:

- a. Pembayaran Pegawai.
- b. Pembayaran Barang.
- c. Pembayaran Bunga.
- d. Pembayaran Subsidi.
- e. Pembayaran Hibah.
- f. Pembayaran Bantuan Sosial.
- g. Pembayaran Lain-lain/Kejadian Luar Biasa.
- h. Pembayaran Transfer.

### **3.1.3.2. Informasi Arus Kas Investasi**

Definisi aktivitas investasi yang terdapat dalam Pernyataan No. 03 SAP adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus kas ini mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Pernyataan No. 03 SAP menyebutkan sumber-sumber penerimaan pemerintah yang termasuk ke dalam arus kas masuk dari aktivitas investasi terdiri dari:

- a. Penjualan Aset Tetap.
- b. Penjualan Aset Lainnya.
- c. Pencairan Dana Cadangan.
- d. Penerimaan dari Divestasi.
- e. Penjualan Investasi dalam bentuk Sekuritas.

Sementara, jenis-jenis pengeluaran pemerintah yang dapat digolongkan sebagai arus kas keluar dari aktivitas investasi terdiri dari:

- a. Perolehan Aset Tetap.
- b. Perolehan Aset Lainnya.
- c. Pembentukan Dana Cadangan.
- d. Penyertaan Modal Pemerintah.
- e. Pembelian Investasi dalam bentuk Sekuritas.

### **3.1.3.3. Informasi Arus Kas Pembiayaan**

Pernyataan No. 03 SAP menyebutkan aktivitas pembiayaan sebagai aktivitas pendanaan. Definisi dari aktivitas pendanaan yang dimaksud adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang. Arus kas ini mencerminkan penerimaan dan

pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.

Jenis aktivitas penerimaan yang merupakan bagian arus kas masuk dari aktivitas pendanaan berdasarkan pernyataan No. 03 SAP terdiri dari:

- a. Penerimaan utang luar negeri.
- b. Penerimaan dari utang obligasi.
- c. Penerimaan kembali pinjaman kepada pemerintah daerah.
- d. Penerimaan kembali pinjaman kepada perusahaan negara.

Sementara, jenis aktivitas pengeluaran yang merupakan bagian arus kas keluar dari aktivitas pendanaan berdasarkan pernyataan No. 03 SAP antara lain:

- a. Pembayaran pokok utang luar negeri.
- b. Pembayaran pokok utang obligasi.
- c. Pengeluaran kas untuk dipinjamkan kepada pemerintah daerah.
- d. Pengeluaran kas untuk dipinjamkan kepada perusahaan negara.

### **3.2. Populasi**

Populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah semua pemerintah daerah yang berbentuk pemerintah kabupaten yang telah diaudit oleh BPK RI yaitu 395 pemerintah daerah. Tujuan penggunaan populasi hanya pemerintah kabupaten adalah untuk menghindari bias akibat perbedaan karakteristik antara pemerintah kabupaten dan pemerintah non kabupaten. Tahun Anggaran 2011 dipilih karena data tersebut dinilai paling lengkap dan memadai secara kuantitas pada saat penelitian dilakukan. Hal tersebut bertujuan agar

penelitian dapat menggambarkan seutuhnya kondisi perilaku pemerintah daerah berbentuk kabupaten di Indonesia dalam penganggaran belanja modalnya.

Untuk menguji hipotesis  $H_1$ ,  $H_2$ ,  $H_3$ , dan  $H_4$  penulis akan mengambil seluruh populasi. Kemudian dari jumlah populasi tersebut akan dikelompokkan ke dalam 3 klaster sesuai dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2007, yaitu:

1. Klaster a, yang merupakan kelompok daerah dengan kemampuan keuangan tinggi.
2. Klaster b, yang merupakan kelompok daerah dengan kemampuan keuangan sedang.
3. Klaster c, yang merupakan kelompok daerah dengan kemampuan keuangan rendah.

### **3.3. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2011. Data yang digunakan tersebut terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2011, Laporan Arus Kas Tahun Anggaran 2011, Penetapan APBD Tahun Anggaran 2011, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Data-data tersebut diperoleh dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) BPK RI Tahun 2012.

### **3.4. Metode Pengumpulan Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, sehingga metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi tersebut dilakukan dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan

menghitung data-data yang berhubungan dengan penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data populasi pemerintah daerah kabupaten di Indonesia dengan kriteria telah memiliki Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA.2011 yang telah diaudit oleh BPK RI dan memiliki SiLPA dalam laporan keuangannya tersebut.

### **3.5. Metode Analisis**

#### **3.5.1. Pengelompokan Pemerintah Daerah**

Pengelompokan Pemerintah Daerah dalam penelitian ini menerapkan pendekatan teori siklus hidup perusahaan yang dikemukakan oleh Black (1998) dengan menggunakan Permendagri No. 21 Tahun 2007 sebagai dasar pengelompokan. Masing-masing pemerintah akan dihitung kemampuan daerahnya dengan perhitungan total realisasi pendapatan pemerintah daerah selama satu tahun anggaran dikurangi dengan realisasi belanja pegawai pada tahun anggaran tersebut. Selanjutnya, berdasarkan kemampuan keuangan daerah tersebut, pemerintah daerah akan dibagi ke dalam tiga klaster, yaitu:

- a. Klaster a sebagai klaster tertinggi dengan klasifikasi pemerintah daerah yang memiliki kemampuan keuangan daerah di atas Rp400.000.000.000,00 (empat ratus milyar rupiah).
- b. Klaster b sebagai klaster tengah dengan klasifikasi pemerintah daerah yang memiliki kemampuan keuangan daerah di antara Rp200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp400.000.000.000,00 (empat ratus milyar rupiah).

- c. Klaster c sebagai klaster terendah dengan klasifikasi pemerintah daerah yang memiliki kemampuan keuangan daerah di bawah Rp200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah).

### 3.5.2. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (Ghozali, 2005). Dalam penelitian ini, statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran jumlah dari variabel-variabel pada masing-masing klaster pemerintah daerah.

### 3.5.3. Uji Kelayakan Model

Uji Kelayakan Model atau koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen (Ghozali, 2005). Dalam koefisien determinasi ini, skala nilai yang digunakan adalah antara nol sampai dengan satu. Semakin kecil nilai  $R^2$ , artinya kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen memiliki keterbatasan.

Menurut Ghozali (2005), kelemahan dalam penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Artinya, setiap penambahan satu variabel independen, maka  $R^2$  akan meningkat, meskipun variabel independen tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu, dalam mengevaluasi mana model regresi yang terbaik, para peneliti menganjurkan untuk menggunakan *Adjusted R<sup>2</sup>*.

### 3.5.4. Uji Hipotesis

Model analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis  $H_1$  sampai dengan  $H_4$  dalam penelitian ini adalah model regresi berganda (*Multiple Regression*). Pengujian dilakukan dengan menggunakan alat bantu aplikasi SPSS 21.0 (*Statistical Package for Social Science*). Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui pengaruh informasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) APBD, informasi arus kas dari aktivitas operasi, informasi arus kas dari aktivitas investasi, dan informasi arus kas dari aktivitas pembiayaan/pendanaan terhadap penganggaran belanja modal. Model regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$\text{Model I: LN } P_{i,t} = \alpha + \beta_1 \text{SiLPA}_{i,t} + \beta_2 \text{CFOPS}_{i,t} + \beta_3 \text{CFIPS}_{i,t} + \beta_4 \text{CFFPS}_{i,t} + e_{i,t} \quad (5.1)$$

Untuk menguji pengaruh SiLPA, CFPOS, CFIPS, dan CFFPS terhadap penganggaran belanja modal pada pemerintah daerah klaster a.

$$\text{Model II: LN } P_{i,t} = \alpha + \gamma_1 \text{SiLPA}_{i,t} + \gamma_2 \text{CFOPS}_{i,t} + \gamma_3 \text{CFIPS}_{i,t} + \gamma_4 \text{CFFPS}_{i,t} + e_{i,t} \quad (5.2)$$

Untuk menguji pengaruh SiLPA, CFPOS, CFIPS, dan CFFPS terhadap penganggaran belanja modal pada pemerintah daerah klaster b.

$$\text{Model III: LN } P_{i,t} = \alpha + \lambda_1 \text{SiLPA}_{i,t} + \lambda_2 \text{CFOPS}_{i,t} + \lambda_3 \text{CFIPS}_{i,t} + \lambda_4 \text{CFFPS}_{i,t} + e_{i,t} \quad (5.3)$$

Untuk menguji pengaruh SiLPA, CFPOS, CFIPS, dan CFFPS terhadap penganggaran belanja modal pada pemerintah daerah klaster c.

Keterangan :

$LN P_{i,t}$  : LN dari penganggaran belanja modal pemerintah daerah  $i$  pada periode  $t$ .

$SILPA_{i,t}$  : SiLPA APBD pemerintah daerah  $i$  pada periode  $t$ .

$CFOPS_{i,t}$  : Arus kas dari aktivitas operasi pemerintah daerah  $i$  pada periode  $t$ .

$CFIPS_{i,t}$  : Arus kas dari aktivitas investasi pemerintah daerah  $i$  periode  $t$ .

$CFFPS_{i,t}$  : Arus kas dari aktivitas pembiayaan/pendanaan pemerintah daerah  $i$  pada periode  $t$ .

$\alpha$  : Koefisien konstanta.

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$  : Koefisien variabel independen pada pemerintah daerah klaster a.

$\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3, \gamma_4$  : Koefisien variabel independen pada pemerintah daerah klaster b.

$\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4$  : Koefisien variabel independen pada pemerintah daerah klaster c.

$e_{i,t}$  : Variabel gangguan pemerintah daerah  $i$  pada periode  $t$ .

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini akan menggunakan uji statistik  $t$  melalui uji parsial pada masing-masing klaster pemerintah daerah. Menurut Ghozali (2005), tujuan uji statistik  $t$  pada dasarnya adalah untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel independen. Untuk melakukan uji  $t$  dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. Dengan cara *Quick Look* yaitu apabila jumlah *degree of freedom* (df) adalah 20 atau lebih, dan derajat kepercayaan sebesar 5%, maka  $H_0$  yang menyatakan  $b_i = 0$  dapat ditolak bila nilai  $t$  lebih besar dari 2 (dalam nilai absolut).

- b. Membandingkan nilai statistik  $t$  dengan titik kritis menurut tabel. Apabila nilai statistik  $t$  hasil perhitungan lebih tinggi dibandingkan nilai  $t$  tabel, kita menerima hipotesis alternative yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen.

### **3.6. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan**

Kegiatan penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut.

#### **I. Tahap Persiapan**

- a. Penentuan topik penelitian
- b. Perumusan masalah
- c. Penetapan hipotesis penelitian
- d. Perumusan metodologi penelitian
- e. Penyusunan proposal penelitian

#### **II. Tahap Pelaksanaan**

- a. Menyusun instrumen pengumpulan data
- b. Mengadakan uji coba instrumen
- c. Mengumpulkan data penelitian

#### **III. Tahap Pengolahan Data**

Melakukan tabulasi dan pengolahan data penelitian

#### **IV. Tahap Penyusunan Laporan Penelitian**

Menyusun laporan hasil penelitian